

Implementasi Pendidikan Guru Penggerak Sebagai Agen Perubahan ada SMP Negeri 1 Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau

Sandri Hardiansah¹⁾; Zulkarnaen²⁾; Erdi³⁾

^{1,2,3)} Tanjungpura University, Pontianak

Email: sandrihardiansah@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [31 Oktober 2025]

Revised [10 April 2026]

Accepted [15 April 2026]

KEYWORDS

Guru Penggerak, Public Policy, Agents of Change, Learning Transformation, Schools.

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pendidikan Guru Penggerak pada SMP Negeri 1 Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau, dengan fokus pada efektivitas guru penggerak sebagai agen perubahan dalam konteks pendidikan. Permasalahan utama yang diangkat adalah ketimpangan jumlah guru penggerak serta tantangan struktural dan kultural yang menghambat transformasi pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru penggerak telah mampu mengimplementasikan nilai-nilai Merdeka Belajar dan mendorong perubahan di lingkungan sekolah. Namun, implementasi masih menghadapi kendala seperti beban administratif tinggi, resistensi sebagian guru, dan kurangnya dukungan kelembagaan. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa efektivitas guru penggerak sebagai agen perubahan sangat bergantung pada kolaborasi internal sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, serta dukungan kebijakan di tingkat lokal.

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of the Guru Penggerak Training at SMP Negeri 1 Sekadau Hilir, Sekadau Regency. The study focuses on the effectiveness of Guru Penggerak as agents of change within the educational context. The main issues addressed are the imbalance in Guru Penggerak and the structural and cultural challenges hindering learning transformation. This study used a descriptive qualitative approach, collecting data through in-depth interviews, observations, and documentation. The findings show that Guru Penggerak has successfully implemented the "Merdeka Belajar" values and fostered change within the school environment. However, the implementation still faces obstacles such as heavy administrative workloads, resistance from some teachers, and a lack of institutional support. The study concludes that the effectiveness of Guru Penggerak as agents of change heavily relies on internal school collaboration, the leadership of the school principal, and supportive policies at the local level.

PENDAHULUAN

Transformasi pendidikan merupakan agenda strategis yang tidak dapat ditunda dalam menghadapi tantangan globalisasi, perkembangan teknologi, dan kebutuhan akan sumber daya manusia unggul yang berkarakter. Dalam kerangka pembangunan nasional, pendidikan memiliki peran fundamental sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai proses transmisi pengetahuan, tetapi sebagai usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik secara utuh, baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik.

Sebagai respon terhadap tantangan tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia meluncurkan Program Guru Penggerak (PGP) sebagai bagian dari kebijakan Merdeka Belajar episode kelima. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas guru sekaligus menciptakan agen-agen perubahan di sekolah yang mampu mendorong terciptanya ekosistem pembelajaran yang inovatif, kolaboratif, dan berpusat pada murid. Guru Penggerak diharapkan menjadi pelopor transformasi budaya sekolah melalui praktik pembelajaran reflektif, pembinaan sejawat, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan strategis di tingkat satuan pendidikan.

Secara normatif, PGP diatur dalam Keputusan Mendikbudristek Nomor 26 Tahun 2022. Program ini dirancang untuk membentuk profil guru dengan kompetensi kepemimpinan pembelajaran, keberpihakan pada peserta didik, serta kemampuan menjalin kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Namun demikian, keberhasilan implementasi program ini tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan yang ideal, tetapi juga sangat bergantung pada kondisi nyata di lapangan, termasuk kapasitas pelaksana, dukungan lingkungan sekolah, dan kesiapan perubahan budaya kerja.

Fenomena di SMP Negeri 1 Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, menjadi ilustrasi konkret dari kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas pelaksanaan. Sekolah ini hanya memiliki empat orang Guru Penggerak dari total 63 guru aktif, untuk melayani 972 peserta didik.

Keterbatasan jumlah ini berimplikasi pada terbatasnya jangkauan transformasi pembelajaran yang diharapkan oleh program. Selain itu, sebagian besar guru non-guru penggerak belum sepenuhnya memahami filosofi Merdeka Belajar, cenderung mempertahankan pendekatan mengajar konvensional, dan kurang terlibat dalam praktik kolaboratif yang konstruktif.

Upaya yang telah dilakukan, seperti pembentukan komunitas belajar dan program mentoring antar-guru, masih bersifat parsial dan belum menjangkau seluruh elemen sekolah. Dukungan struktural dari pihak manajemen sekolah dan institusi pendidikan daerah juga masih terbatas, baik dari segi kebijakan internal, penyediaan fasilitas pendukung, maupun alokasi waktu dan pembagian tugas yang proporsional bagi para guru penggerak. Kondisi ini menunjukkan adanya hambatan yang bersifat struktural, kultural, dan personal dalam proses implementasi program.

Berangkat dari kondisi tersebut, artikel ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan Program Guru Penggerak dalam konteks satuan pendidikan di SMP Negeri 1 Sekadau Hilir;
2. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi peran Guru Penggerak sebagai agen perubahan;
3. Mengidentifikasi strategi serta tantangan dalam penyebaran nilai-nilai transformasional kepada guru non-guru penggerak.

Melalui analisis berbasis konteks lokal dan temuan empiris, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap penguatan kajian implementasi kebijakan publik di sektor pendidikan. Selain itu, artikel ini diharapkan menjadi rujukan praktis bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam merancang strategi transformasi pendidikan yang lebih inklusif dan efektif di tingkat satuan pendidikan.

LANDASAN TEORI

Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan yang menghubungkan proses perumusan dengan pencapaian tujuan kebijakan secara nyata. Pada tahap ini, kebijakan tidak lagi sebatas dokumen formal, tetapi mulai diterjemahkan ke dalam praktik melalui berbagai kegiatan administratif, politik, dan sosial yang saling berinteraksi. Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2008:65) menjelaskan bahwa implementasi mencakup rangkaian aktivitas yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan, baik yang bersifat administratif maupun yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Dengan demikian, implementasi kebijakan menjadi instrumen utama untuk menguji sejauh mana kebijakan dapat diterapkan secara efektif dan memberikan perubahan yang diharapkan.

Van Meter dan Van Horn dalam Grindle (1980:6) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan sektor swasta untuk mewujudkan kebijakan yang telah dirumuskan. Dalam pandangan ini, implementasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga politis, karena melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan dan kekuasaan yang berbeda. Oleh karena itu, pemahaman terhadap implementasi kebijakan menuntut analisis yang komprehensif terhadap interaksi antara birokrasi, masyarakat, dan institusi politik (Lane, 1987).

Salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam studi implementasi kebijakan publik adalah teori dari Merilee S. Grindle (1980), yang dikenal dengan istilah *Implementation as a Political and Administrative Process*. Grindle memandang implementasi bukan sekadar proses teknokratis, melainkan juga proses politik dan administratif yang sangat dipengaruhi oleh kepentingan, kekuasaan, serta kondisi kelembagaan dan sosial tempat kebijakan dijalankan (Grindle, 1980).

Keberhasilan implementasi, menurut Grindle (1980), ditentukan oleh dua kelompok variabel utama, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*).

1. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

Variabel ini berkaitan dengan substansi kebijakan itu sendiri, meliputi enam aspek utama:

- a. Kepentingan yang terpengaruh (*interest affected*), yaitu sejauh mana kebijakan menyentuh dan melibatkan berbagai kepentingan aktor;
- b. Tipe manfaat (*type of benefits*), yakni manfaat nyata yang dihasilkan kebijakan bagi kelompok sasaran;
- c. Derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*), yaitu skala perubahan yang menjadi target kebijakan;
- d. Letak pengambilan keputusan (*site of decision making*), yaitu kejelasan struktur dan lokasi pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kebijakan;
- e. Pelaksana program (*program implementer*), yang menekankan kapasitas dan kompetensi aktor pelaksana;
- f. Sumber daya yang digunakan (*resources committed*), yakni dukungan sumber daya yang memadai untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kebijakan (Grindle, 1980:7).

2. Konteks Implementasi (*Context of Implementation*)

Variabel ini menyoroti lingkungan sosial, politik, dan kelembagaan tempat kebijakan diterapkan, yang terdiri atas:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat dalam implementasi;
- b. Karakteristik institusi dan rezim yang memengaruhi proses pelaksanaan kebijakan; dan
- c. Tingkat kepatuhan serta responsivitas pelaksana terhadap kebijakan yang ditetapkan (Grindle, 1980:7–8).

Kedua variabel ini bekerja secara simultan. Isi kebijakan menentukan apa yang harus diimplementasikan dan siapa yang berperan, sedangkan konteks implementasi menentukan bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dalam kondisi sosial-politik yang spesifik. Dengan kata lain, desain kebijakan yang baik tidak otomatis menjamin keberhasilan implementasi tanpa dukungan lingkungan pelaksanaan yang kondusif (Subarsono, 2011).

Pendekatan Grindle sangat relevan digunakan dalam menganalisis pelaksanaan berbagai program pemerintah, termasuk sektor pendidikan. Dalam konteks kebijakan Program Guru Penggerak (PGP), teori ini menjadi kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami sejauh mana kebijakan dapat diterapkan secara efektif di satuan pendidikan.

Melalui dimensi *content of policy*, peneliti dapat mengevaluasi substansi PGP, mulai dari kepentingan berbagai aktor pendidikan, manfaat program bagi guru dan sekolah, kejelasan peran pelaksana, hingga ketersediaan sumber daya pendukung. Sementara itu, dimensi *context of implementation* memungkinkan peneliti menelaah kondisi sosial-politik sekolah, karakter kelembagaan, kepemimpinan, serta tingkat partisipasi aktor pendidikan yang turut menentukan keberhasilan pelaksanaan program.

Dengan kerangka ini, analisis implementasi kebijakan tidak hanya berhenti pada deskripsi program, tetapi juga mampu mengidentifikasi faktor penghambat, pendorong, serta peluang strategis yang muncul selama proses pelaksanaan kebijakan. Hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis terhadap penguatan pelaksanaan kebijakan publik di bidang pendidikan (Wahab, 2012; Grindle, 1980).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika implementasi Program Guru Penggerak sebagai agen perubahan di SMP Negeri 1 Sekadau Hilir. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menangkap realitas sosial yang kompleks, kontekstual, dan dinamis secara utuh, terutama dalam konteks implementasi kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk menyajikan gambaran sistematis dan faktual mengenai fenomena yang terjadi di lapangan (Bogdan & Biklen, 2007).

Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi secara lebih mendalam proses pelaksanaan, tantangan, serta makna dari kebijakan yang sedang diimplementasikan. Sejalan dengan pandangan Creswell (2016), pendekatan ini memberikan ruang untuk menginterpretasi pengalaman para pelaku kebijakan secara subjektif, termasuk guru penggerak, kepala sekolah, dan guru non-guru penggerak. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk memahami bagaimana kebijakan nasional diterjemahkan dalam praktik nyata di lingkungan sekolah dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Grindle (1980). Teori tersebut menekankan dua dimensi utama dalam implementasi kebijakan, yaitu *content of policy* (isi kebijakan) dan *context of implementation* (konteks implementasi), yang menjadi landasan analisis dalam penelitian ini.

Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 1 Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Sekolah ini dipilih karena hanya memiliki empat orang guru penggerak dari total 63 guru aktif, dengan jumlah siswa sebanyak 972 orang. Ketimpangan ini menjadi faktor yang relevan untuk ditelaah secara lebih mendalam dalam konteks efektivitas dan tantangan implementasi kebijakan pendidikan transformatif. Penelitian dilakukan dari bulan November 2024 hingga Juli 2025, meliputi tahap persiapan, pengumpulan data lapangan, analisis, hingga penyusunan laporan.

Subjek penelitian meliputi empat guru penggerak, kepala sekolah, sepuluh guru non-guru penggerak, serta satu pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sekadau. Adapun objek penelitian adalah implementasi Program Guru Penggerak sebagai agen perubahan, dengan fokus pada praktik, peran guru penggerak, serta dampaknya terhadap ekosistem pembelajaran. Analisis difokuskan pada keterkaitan antara kebijakan nasional dan dinamika lokal di satuan pendidikan, menggunakan dimensi teori Grindle (1980) sebagai kerangka konseptual.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur terhadap berbagai informan kunci. Pedoman wawancara disusun berdasarkan aspek-aspek dalam teori Grindle, mencakup indikator dari *content of policy* dan *context of implementation*. Observasi non-partisipatif dilakukan untuk menangkap interaksi dan praktik pembelajaran di lingkungan sekolah, tanpa adanya intervensi peneliti. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan bukti administratif dan visual seperti dokumen kebijakan, laporan kegiatan, serta foto pendukung.

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menerapkan empat strategi keabsahan yang lazim dalam penelitian kualitatif, yaitu: (1) kredibilitas, melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu; (2) transferabilitas, melalui penyajian konteks penelitian secara rinci dan deskriptif; (3) dependabilitas, dengan pencatatan sistematis seluruh proses penelitian (*audit trail*); dan (4) konfirmabilitas, dengan menjaga objektivitas peneliti melalui pencatatan reflektif dan dokumentasi bukti pendukung (Lincoln & Guba, 1985).

Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles dan Huberman (1994), yang meliputi tiga tahap utama, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta pengujian kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring data berdasarkan kategori isi kebijakan dan konteks implementasi. Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi tematik, tabel, dan matriks agar mudah dianalisis. Proses analisis dilakukan secara simultan selama pengumpulan data berlangsung.

Secara teknis, analisis data dilakukan dengan pendekatan coding terbuka dan selektif. Data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis secara induktif untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari lapangan. Kode-kode awal dikembangkan berdasarkan narasi empiris, kemudian dikaitkan dengan indikator dalam teori implementasi Grindle, khususnya pada dua dimensi utama: *content of policy* dan *context of implementation*. Proses ini memungkinkan peneliti menyusun subtema yang berakar dari pengalaman nyata informan, sekaligus memetakan kesesuaiannya dengan kerangka teoritik. Dengan demikian, analisis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga interpretatif dan reflektif terhadap dinamika implementasi kebijakan di satuan pendidikan (Sugiyono, 2017). Melalui desain metodologi ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan temuan yang kaya konteks, valid, dan relevan dalam menjawab persoalan implementasi Program Guru Penggerak sebagai agen perubahan di satuan pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Substansi Kebijakan Program Guru Penggerak (*Content of Policy*)

Implementasi Program Guru Penggerak (PGP) di SMP Negeri 1 Sekadau Hilir dirancang sebagai upaya transformasi pendidikan dengan menempatkan guru sebagai agen perubahan. Program ini menekankan penguatan peran guru tidak hanya sebagai pelaksana kurikulum, tetapi juga sebagai pemimpin pembelajaran, penggerak komunitas, dan teladan bagi rekan sejawat. Sejalan dengan pandangan Grindle (1980), isi kebijakan yang baik harus mencakup tujuan yang jelas, sasaran yang tepat, strategi implementasi yang adaptif, serta mekanisme evaluasi yang terukur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan PGP di sekolah ini telah dipahami secara cukup baik oleh para aktor pelaksana. Kepala sekolah menegaskan bahwa guru penggerak diharapkan menjadi teladan, memotivasi kolaborasi, serta mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Pernyataan ini sejalan dengan tanggapan guru non-guru penggerak yang memandang program sebagai upaya membentuk guru dengan kapasitas kepemimpinan dan keteladanan. Dengan demikian, orientasi kebijakan telah diarahkan pada perubahan paradigma peran guru dari sekadar pengajar menuju pemimpin pembelajaran.

Strategi implementasi di SMP Negeri 1 Sekadau Hilir ditunjukkan melalui inisiatif guru penggerak dalam memfasilitasi sosialisasi, membangun komunitas belajar, serta mendorong kolaborasi lintas guru. Kehadiran seorang fasilitator nasional sekaligus guru penggerak menjadi faktor strategis, karena mampu menjembatani antara regulasi di tingkat pusat dengan praktik di lapangan. Komunitas praktisi Bergerak Bersama SMPN 1 Sekadau Hilir (BBS1SH) menjadi wadah penting dalam mendiseminasikan praktik baik, menyelenggarakan pelatihan, serta memperkuat budaya kolaboratif di sekolah. Hal ini merepresentasikan strategi kebijakan yang tidak hanya administratif, tetapi juga substantif karena mendorong internalisasi nilai Merdeka Belajar dalam kultur sekolah.

Temuan juga memperlihatkan bahwa implementasi PGP berhasil mendorong partisipasi siswa dalam pengambilan keputusan kelas serta meningkatkan keterbukaan guru untuk berdiskusi. Praktik ini mencerminkan pergeseran budaya belajar dari model *teacher-centered* menuju *student-centered learning*. Selain itu, aksi nyata seperti workshop penyusunan perangkat pembelajaran dan diseminasi

budaya positif menjadi bukti penerapan materi kebijakan ke dalam praktik konkret. Dengan demikian, kebijakan tidak berhenti sebagai dokumen formal, tetapi dihidupkan melalui aktivitas kolaboratif yang kontekstual.

Meskipun demikian, terdapat tantangan yang cukup signifikan. Rasio guru penggerak yang hanya empat orang dari total 63 guru menciptakan kesenjangan internal dalam penyebaran praktik baik. Kondisi infrastruktur yang kurang memadai juga berdampak pada penerapan strategi berdiferensiasi secara optimal, terutama karena sekolah harus melaksanakan pembelajaran dengan sistem dua sesi. Situasi ini mengurangi intensitas keterlibatan siswa dan menambah beban kerja guru. Dalam perspektif Grindle, kondisi tersebut menegaskan bahwa kualitas content of policy yang baik tetap membutuhkan dukungan konteks implementasi agar berjalan efektif.

Secara umum, isi kebijakan PGP di SMP Negeri 1 Sekadau Hilir telah memenuhi prinsip dasar kebijakan yang efektif menurut Grindle, yaitu adanya kejelasan tujuan, keterlibatan aktor pelaksana, strategi implementasi yang relevan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi. Namun, keterbatasan jumlah guru penggerak dan kendala struktural menjadi faktor penghambat yang harus diatasi agar kebijakan dapat menghasilkan transformasi yang lebih merata dan berkelanjutan.

Konteks Implementasi Program Guru Penggerak (*Context of Implementation*)

Menurut Grindle (1980), keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh konteks tempat kebijakan dijalankan. Konteks implementasi mencakup kepemimpinan, kapasitas sumber daya, dukungan kelembagaan, serta dinamika sosial-budaya di tingkat lokal. Dalam penelitian ini, konteks implementasi Program Guru Penggerak (PGP) di SMP Negeri 1 Sekadau Hilir memperlihatkan adanya interaksi yang kompleks antara faktor pendukung dan faktor penghambat yang memengaruhi capaian program.

Aktor Pelaksana

Aktor utama dalam implementasi PGP di SMP Negeri 1 Sekadau Hilir adalah kepala sekolah, guru penggerak, guru non-guru penggerak, serta pihak eksternal seperti Dinas Pendidikan dan Balai Guru Penggerak Kalimantan Barat. Kepala sekolah memainkan peran strategis sebagai pemimpin kelembagaan yang memberikan arahan, dukungan, dan legitimasi bagi terlaksananya program. Dalam wawancara, kepala sekolah menegaskan bahwa PGP merupakan “jalan membangun kultur belajar yang lebih terbuka, di mana guru-guru lebih aktif berdiskusi dan melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan” (Wawancara dengan Albinus, 29 Mei 2025).

Guru penggerak di sekolah ini menunjukkan komitmen yang tinggi sebagai agen perubahan. Mereka tidak hanya menjalankan peran sebagai pengajar, tetapi juga fasilitator pembelajaran, mentor bagi guru lain, serta motor penggerak komunitas praktisi. Seorang guru penggerak menyatakan bahwa “tugas ini mensyaratkan komitmen dan integritas untuk membimbing rekan-rekan guru merefleksikan metode mengajar mereka secara kritis serta mendorong transformasi berkelanjutan” (Wawancara dengan Margaretha Irena, 20 April 2025).

Guru non-guru penggerak pada dasarnya menyambut baik keberadaan program, meskipun tingkat keterlibatannya beragam. Sebagian aktif terlibat dalam komunitas praktisi dan diskusi pembelajaran, sementara sebagian lain masih menunjukkan resistensi terhadap perubahan. Seorang guru non-guru penggerak menyatakan, “PGP memang membuka wawasan baru, tetapi tidak mudah mengubah cara mengajar yang sudah puluhan tahun kami lakukan” (Wawancara dengan Tiodora, 24 April 2025). Hal ini menggambarkan adanya tantangan dalam menginternalisasi nilai-nilai baru, yang sejalan dengan pandangan Grindle bahwa aktor pelaksana tidak selalu homogen dalam merespons kebijakan.

Karakteristik Lingkungan Sekolah

Kondisi infrastruktur sekolah menjadi salah satu faktor penentu dalam konteks implementasi. SMP Negeri 1 Sekadau Hilir mengalami kerusakan berat pada 20 ruang kelas, sehingga harus menerapkan sistem pembelajaran dua sesi. Situasi ini berdampak signifikan pada efektivitas PGP. Guru penggerak mengungkapkan bahwa “dengan sistem dua sesi, siswa pada sesi siang sering terlihat kelelahan, kurang konsentrasi, dan tidak bersemangat mengikuti pembelajaran” (Wawancara dengan Sri Suryani, 29 April 2025).

Keterbatasan fisik ini menyebabkan ritme pembelajaran terfragmentasi, waktu belajar berkurang, serta menambah beban psikososial bagi guru maupun siswa. Dalam perspektif Grindle (1980), faktor eksternal seperti kondisi infrastruktur merupakan bagian dari konteks implementasi yang dapat menghambat tercapainya tujuan kebijakan, meskipun substansi kebijakan itu sendiri telah dirancang dengan baik.

Faktor Pendukung

Implementasi PGP di SMP Negeri 1 Sekadau Hilir ditopang oleh beberapa faktor pendukung utama. Pertama, kepemimpinan kepala sekolah yang visioner dan terbuka terhadap inovasi menjadi fondasi penting. Kepala sekolah secara konsisten mendukung inisiatif guru penggerak dengan memberikan ruang dan legitimasi. Kedua, komitmen guru penggerak yang tinggi tercermin dari berbagai aksi nyata, seperti penyusunan perangkat ajar berbasis Kurikulum Merdeka, fasilitasi workshop, serta diseminasi budaya positif. Ketiga, keberadaan komunitas praktisi “Bergerak Bersama SMPN 1 Sekadau Hilir (BBS1SH)” menjadi ruang kolaborasi antar guru untuk berbagi praktik baik, memperkuat kompetensi, dan menumbuhkan budaya belajar kolektif. Dukungan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau juga memperkuat pelaksanaan program, melalui penyelenggaraan bimbingan teknis dan monitoring evaluasi. Dukungan eksternal ini membantu menjembatani kebijakan nasional dengan praktik di tingkat sekolah

Faktor Penghambat

Meskipun memiliki sejumlah faktor pendukung, implementasi PGP di sekolah ini juga menghadapi berbagai hambatan. Hambatan pertama adalah resistensi sebagian guru non-guru penggerak yang masih enggan mengadopsi inovasi pembelajaran. Hambatan kedua adalah keterbatasan infrastruktur akibat kerusakan gedung, yang berimplikasi pada menurunnya kualitas iklim belajar. Hambatan ketiga adalah keterbatasan waktu guru penggerak, karena mereka harus membagi peran sebagai pengajar, fasilitator, sekaligus mentor sejawat. Kondisi ini membuat proses pendampingan kepada guru lain belum optimal.

Seorang guru penggerak menuturkan, “kadang kami kewalahan, karena selain mengajar sesuai jadwal, kami juga harus mendampingi rekan-rekan lain dan menggerakkan komunitas belajar” (Wawancara dengan Hadijah, 27 April 2025). Testimoni ini memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan yang menuntut peran ganda dari guru penggerak berpotensi menimbulkan beban kerja berlebih.

Strategi dan Mitigasi

Untuk mengatasi hambatan tersebut, berbagai strategi mitigasi dilakukan. Di tingkat sekolah, komunitas praktisi BBS1SH menjadi wadah penting untuk memperluas jangkauan nilai-nilai PGP kepada guru non-guru penggerak. Melalui workshop dan diskusi rutin, guru-guru non-guru penggerak mulai terpapar praktik pembelajaran inovatif. Selain itu, sekolah juga meningkatkan koordinasi internal melalui rapat rutin yang membahas implementasi program.

Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau turut berperan dengan menyelenggarakan bimbingan teknis, menghadirkan fasilitator dari Balai Guru Penggerak Kalimantan Barat, serta memberikan ruang refleksi bersama untuk mengatasi resistensi guru. Strategi mitigasi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga memerlukan dukungan berlapis dari pemerintah daerah dan instansi teknis terkait.

penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PGP di SMP Negeri 1 Sekadau Hilir berjalan dalam dinamika yang kompleks. Di satu sisi, terdapat faktor pendukung yang kuat berupa kepemimpinan kepala sekolah, komitmen guru penggerak, serta eksistensi komunitas praktisi. Di sisi lain, hambatan berupa kerusakan infrastruktur, resistensi guru, dan beban kerja berlebih memperlambat proses transformasi.

Fenomena ini menguatkan argumen Grindle (1980) bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat bergantung pada konteks implementasi. Dengan kata lain, meskipun isi kebijakan telah dirancang dengan baik, implementasinya tetap ditentukan oleh faktor lingkungan, karakteristik aktor, serta strategi adaptasi di lapangan. Oleh karena itu, PGP di SMP Negeri 1 Sekadau Hilir dapat dikategorikan berhasil secara parsial: program telah menumbuhkan budaya kolaborasi dan inovasi, namun belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan struktural dan resistensi individu. Dengan demikian, diperlukan strategi berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas guru penggerak, memperluas internalisasi nilai program kepada seluruh tenaga pendidik, serta memperbaiki infrastruktur sekolah agar implementasi kebijakan benar-benar mampu menghasilkan transformasi pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Program Guru Penggerak (PGP) di SMP Negeri 1 Sekadau Hilir menunjukkan hasil yang positif namun masih bersifat parsial. Analisis menggunakan

kerangka Grindle (1980) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks pelaksanaan.

Pada dimensi isi kebijakan (*content of policy*), tujuan, strategi, dan materi program telah dirumuskan dengan jelas sesuai arah kebijakan nasional. Akan tetapi, terdapat kesenjangan antara desain kebijakan dan praktik di lapangan. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya pemahaman guru non-guru penggerak terhadap filosofi Merdeka Belajar serta keterbatasan sumber daya pendukung yang menghambat optimalisasi implementasi.

Pada dimensi konteks implementasi (*context of implementation*), dukungan kepala sekolah yang menjalankan kepemimpinan transformasional dan komitmen guru penggerak menjadi faktor pendorong penting. Namun, resistensi sebagian guru terhadap perubahan, keterbatasan sarana prasarana yang berakibat pada sistem pembelajaran dua sesi, serta kultur organisasi yang belum sepenuhnya adaptif menjadi tantangan utama.

Selain itu, faktor kelembagaan seperti pelatihan berkelanjutan, keberadaan komunitas praktisi, serta dukungan teknis dari Dinas Pendidikan berperan dalam menjaga konsistensi implementasi. Meski demikian, efektivitas program masih sangat bergantung pada kapasitas individu, dukungan kelembagaan, serta kesiapan lingkungan sekolah. Hal ini sejalan dengan temuan sebelumnya bahwa keberhasilan kebijakan transformasional tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan, tetapi juga kondisi sosial dan budaya yang melingkupinya (Fullan, 2007; Sugiyarta et al., 2020).

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Kepala sekolah perlu memperkuat praktik kepemimpinan transformasional yang menekankan visi, motivasi, dan kolaborasi, sebagaimana ditegaskan oleh Fullan (2007) bahwa kepemimpinan visioner merupakan kunci keberhasilan perubahan pendidikan. Selain itu, kepala sekolah disarankan untuk mengoptimalkan strategi manajerial dalam pemulihan infrastruktur melalui pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta mengatur distribusi beban kerja guru agar implementasi Program Guru Penggerak lebih inklusif dan berkelanjutan.
2. Guru penggerak perlu memperkuat peran sebagai agen diseminasi praktik baik dengan memfasilitasi peer mentoring, lokakarya internal, dan penguatan komunitas praktisi. Peran ini selaras dengan konsep teacher leadership yang menekankan pentingnya guru sebagai katalis perubahan di lingkungan sekolah (York-Barr & Duke, 2004). Upaya ini diharapkan dapat memperluas pemahaman nilai-nilai Merdeka Belajar di kalangan guru non-guru penggerak, sehingga transformasi pendidikan tidak hanya berhenti pada kelompok kecil.
3. Mengingat hasil penelitian menemukan adanya resistensi sebagian guru terhadap inovasi, guru non-guru penggerak perlu meningkatkan keterlibatan dalam komunitas praktisi dan mengembangkan sikap reflektif serta kolaboratif. Hal ini penting karena partisipasi aktif guru non-guru penggerak dapat mempercepat difusi inovasi pendidikan, sekaligus memperkuat daya adaptif sekolah dalam menghadapi perubahan kebijakan.
4. Pemerintah daerah dan dinas pendidikan disarankan untuk memprioritaskan penguatan sarana prasarana sekolah, mengingat keterbatasan infrastruktur menjadi hambatan utama implementasi. Selain itu, diperlukan penyediaan pelatihan berkelanjutan, supervisi partisipatif, serta forum refleksi lintas sekolah sebagai instrumen penguatan kapasitas implementasi. Upaya ini sejalan dengan prinsip policy feedback (Pierson, 1993), bahwa keberlanjutan kebijakan hanya dapat terjamin apabila pemerintah secara aktif menyediakan dukungan teknis dan evaluasi adaptif.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, Wiliam (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Grindle, M. S. (1980). Politics and Policy Implementation in the Third World. Princeton University Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru (T.R. Rohidi & Mulyarto, Penerj.). Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Moelong, Lexy J. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Moelong, Lexy J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Patilima, Hamid. (2005). Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta.
- Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Tachjan, H. 2008. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Truen RTH

- Baedhowi. 2004. Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan: Studi Kasus di Kabupaten Kendal dan Kota Surakarta, Disertasi Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mulyasa, H. E. 202. Menjadi Guru Penggerak Merdeka Belajar. Jakarta: Bumi Aksara.
- Aulia, A., Sumardi, L., Kurniawansyah, E., & Mustari, M. 2023. "Implementasi Kebijakan Program Guru Penggerak" (Studi di Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Barat). dalam Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, hal.1165–1173, 2023.
- Fitria, D., & Iskandar, B. 2023. "Peran Guru Penggerak dalam meningkatkan motivasi dan kreativitas guru di sekolah". Dalam Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, hal.12-25, 2023.
- Faiz, A., & Faridah, F. 2022. "Program Guru Penggerak sebagai Sumber Belajar". Dalam KONSTRUKTIVISME: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, hal.82–88, 2022.
- Gani, R. H. A., Supratmi, N., Ernawati, T., & Wijaya, H. 2024. "Pembinaan guru inspiratif: pelatihan supervisi akademik berorientasi coaching dalam Program Pendidikan Guru Penggerak di Lombok Timur". Dalam Jurnal Pengabdian masyarakat Sultan Indonesia, hal.45-56. 2024.
- Hasanah, A. H., Adha, M. M., & Mentari, A. 2022. "Peran Guru Penggerak dalam Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila di Sekolah". Dalam DE CIVE: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarnagegaraan, hal.6-14, 2022.
- Jannati, P., Ramadhan, F. A., & Rohimawan, M. A. 2023. "Peran Guru Penggerak dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar". Dalam AL-MADRASAH: Jurnal Pendidikan madrasah Ibtidaiyah, hal.330-345, 2023.
- Najwa, L. 2024. "Analisis Peran Guru Penggerak dalam Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila di Sekolah Dasar. Dalam JURNAL VISIONARY: Penelitian Dan Pengembangan Di Bidang Administrasi Pendidikan, hal.248-253, 2024.
- Nafiah, D. A., & Dafit, F. 2023. "Peran Guru Penggerak dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di SDN 018 Sorek Satu". Dalam INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, hal.3, 2023.
- Sodik, N., Oviyanti, F., & Afghani, M. W. 2022. "Strategi Meningkatkan Kinerja Guru melalui Program Guru Penggerak". Dalam STUDIA MANAGERIA, hal.107-120, 2022.
- Santika, A., & Khoiriyah, L. 2023. "Integrasi teknologi dalam pendidikan: meningkatkan keterampilan pedagogik guru". Dalam Jurnal Teknologi Pendidikan Internasional, hal.22-24. 2023.
- Yokoyama, Y., Nadeak, B., & Sihotang, H. 2023. "Implementasi Kompetensi Guru Penggerak dalam Menerapkan Merdeka Belajar SMK di Tana Toraja". Dalam Jurnal Dinamika Pendidikan, hal.187-200, 2023.
- Kemendikbud. (2020). Panduan Program Guru Penggerak. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI. 2022. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak. Jakarta.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI. 2025. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Jakarta